

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Mawar No.1 Lubuk Pakam

Nomor Telepon : (061) 7954185

Website : dishub.deliserdangkab.go.id

E-mail : dinasperhubungan.deliserdang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Perhubungan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Januari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja.....	14
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	15
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan ...	15
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	17
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	19

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	19
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	21
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	23
3.2	Realisasi Anggaran	25
3.3	Analisis Capaian Kinerja.....	27
BAB IV		36
PENUTUP		36
LAMPIRAN		40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022....	7
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	8
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan.....	9
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	9
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	15
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	16
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	17
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota.....	19
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	19
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	23
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	25
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1.....	27
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1.....	28
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2.....	29
Tabel 3.13 Daftar ruas jalan/persimpangan rawan kemacetan.....	31
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian



kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Perhubungan :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

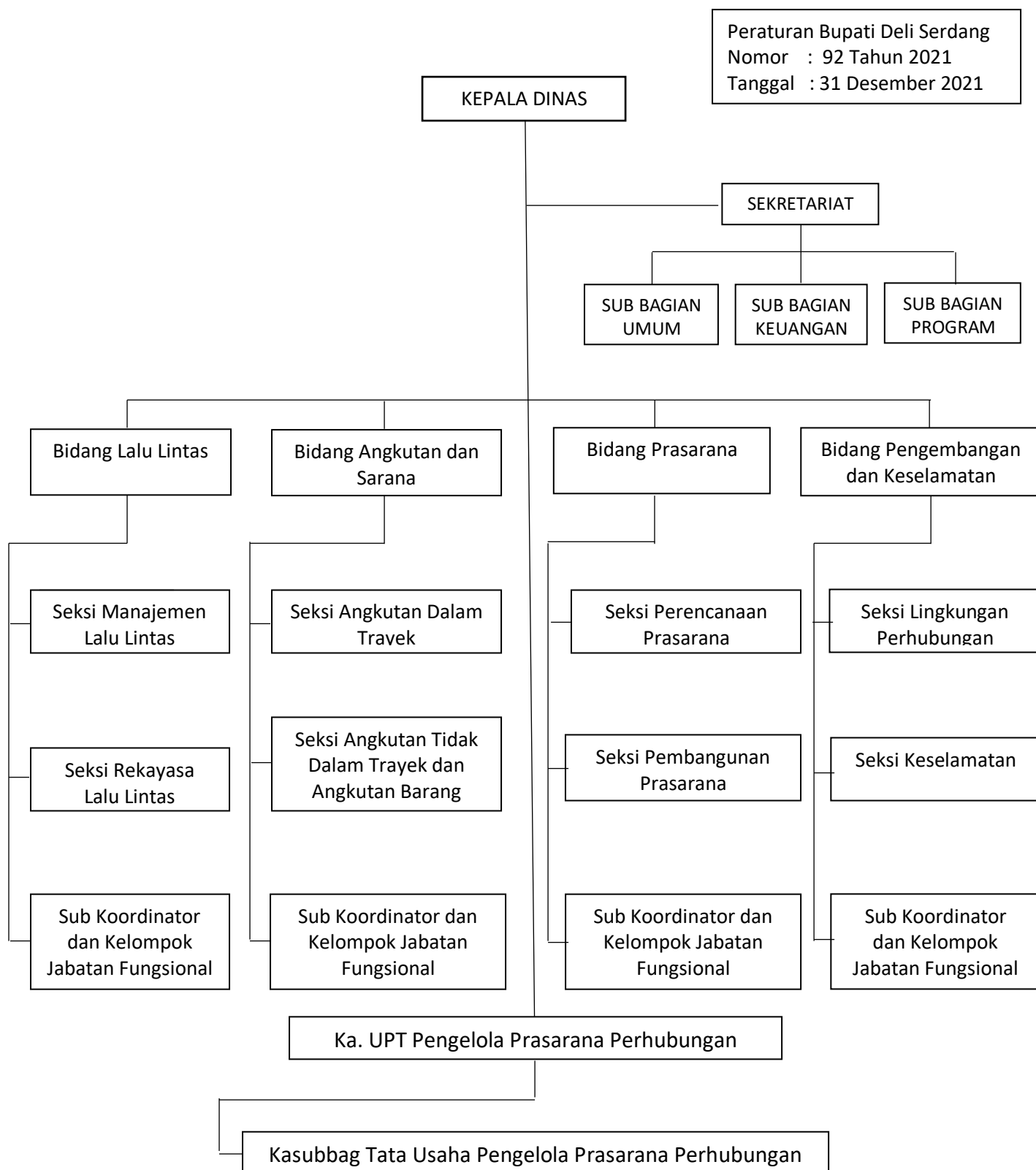
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pembinaan Teknis Dinas sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan. Berikut bagan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2021	Rp 17.236.475.549,-
APBD	2022	Rp 14.413.675.374,-

Sumber : DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan 2022

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.



1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Perhubungan adalah Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	80	81
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70	72	74	76	78
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan	2.1 Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	60	63	66	68	70
			Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	39	48	56	65	72

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Periode 2019 - 2024



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	Nilai rata-rata dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kartu Pengawasan dan Insidentil serta Penerbitan Kartu tanda juru parkir khusus.	Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
		1.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	point	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan pada tahun n-1	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	2.1	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	%	$\frac{\text{jumlah ruas jalan dan persimpangan yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas}}{\text{jumlah ruas jalan dan persimpangan yang menjadi target}} \times 100 \%$	Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
		2.2	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	%	$\frac{\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada}} \times 100 \% + \frac{\text{Jumlah prasarana dan simpul transportasi yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada}} \times 100 \% : 2$	Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 :



Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	79
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	74
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan	2.1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	prosentase	66
				Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	prosentase	56

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak



terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	Nilai
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	Poin



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran	100	Persentase
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	Persentase
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	OB
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	Persentase
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Persentase
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17	Paket



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524	Laporan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan	100	Persentase
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan	100	Persentase
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pelayanan Perhubungan	100	Persentase
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	Unit
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	66	Persentase
		Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai	56	Persentase
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	100	Persentase
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Unit
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6	Unit
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3	Unit
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100	Persentase
-	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	14840	Unit



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	Unit
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	Persentase
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan
-	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20	Laporan
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum	100	Persentase
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	250	Laporan
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12	Laporan
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15	Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79,02	100,02	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	61,69	83,36	Tinggi	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2021



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66	66,67	101,01	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56	56,50	100,89	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada tabel diatas secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 96,32 %, yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian dari 4 (empat) indikator kinerja utama. Dari 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran tersebut rata-rata capaian sasaran dinyatakan sangat baik.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 dan tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32	78,57	79	79,02	100,02
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	66,51	82,51	74	61,69	83,36
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	56	59	66	66,67	101,01
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	24	39	56	56,50	100,89

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,02	81	98 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	61,69	78	79 %
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66,67	70	95 %
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56,50	72	78 %

Sumber : Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator kinerja tahun 2022 dari data 4 (empat) indikator sasaran, rata-rata capaian tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 adalah 87,5 %, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mencapai kekurangan realisasi sebesar 12,5 % terhadap capaian target pada akhir Renstra tahun 2024.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi	79,02	85,00	92,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79,02	100,02	Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	Melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	61,69	83,36		
						Adanya dukungan dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam mencapai sasaran yang ditargetkan	Melakukan perbaikan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66	66,67	101,01	Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di persimpangan yang rawan kemacetan.	Penambahan ASN Dinas Perhubungan
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56	56,50	100,89	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perhubungan meningkat	Dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Adanya dukungan dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam mencapai sasaran yang ditargetkan.

Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah permasalahan berupa terjadinya beberapa kali pergeseran anggaran dikarenakan pandemi COVID-19;
2. Keterbatasan Anggaran, Data dan Informasi;



3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD untuk merencanakan kegiatan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Sasaran

No	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79,02	100,02	9.944.318.230	8.255.986.669	83.02	120,4
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	61,69	83,36	9.944.318.230	8.255.986.669	83.02	100,4
2	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66	66,67	101,01	4.469.357.144	3.863.660.779	86.44	116,8
	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56	56,50	100,89	4.469.357.144	3.863.660.779	86.44	116,7

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari sub komponen - sub komponen yang menunjang indikator - indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Dinas



Perhubungan pada 2022 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Kita ambil contoh realisasi Peningkatan Pengawasan Jalan pada 2022 adalah 66,67 dari target 66, sehingga persentase capaian target Peningkatan Pengawasan Jalan adalah 101,01%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut sebanyak Rp 3.863.660.779,- telah terealisasi dari pagu Rp 4.469.357.144,- atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 86,44% untuk mencapai target kinerja Peningkatan Pengawasan Jalan. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja Peningkatan Pengawasan Jalan pada Tahun 2022 adalah 116,8%.

Dengan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di paragraf sebelumnya, Dinas Perhubungan menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan tahun 2022, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator-indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana terlihat di Tabel 3.7, diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan sebesar 116,8% atau 100% pada tahun 2022. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan pada 2022 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2022 telah tercapai dengan realisasi anggaran 84,08%.



Realisasi anggaran Belanja Program/ Kegiatan untuk pencapaian Sasaran sebesar Rp 12.119.647.448,00 atau 84,08% yang sedikit naik dibandingkan capaian keuangan tahun 2021 sebesar 80,35%. Bila dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran tahun 2022 telah digunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan realisasi kinerja sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki secara umum merupakan daya pengungkit atas upaya pencapaian target sasaran dan penghematan penyerapan anggaran.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,02	Menunjang
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	83,36		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	83,36	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran	73.7	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	82.86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	0	Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	88,38	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan	78.18	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan	94.81	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam menunjang Pelayanan Perhubungan	92.75	Menunjang
2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	101,01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	101,01	Menunjang
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	100,89	Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai	100,89	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	25.12	Menunjang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	99.37	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	98.54	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum	97.94	Menunjang

Sumber : LKPD Dinas Perhubungan Tahun 2022

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.944.318.230	8.255.986.669	83,02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.244.720	39.244.000	73.7



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.144.938.254	6.748.854.652	82,86
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.800.000	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.734.230	348.870.403	88,38
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000	351.800.000	78,18
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.633.026	409.244.747	94,81
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.968.000	357.972.867	92,75
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.469.357.144	3.863.660.779	86,44
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	730.880.000	183.590.000	25,12
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	399.887.144	397.382.000	99,37
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.142.790.000	2.111.468.845	98,54
4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.195.800.000	1.171.219.934	97,94

Sumber : LKPD Dinas Perhubungan Tahun 2022



Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian serapan anggaran program/kegiatan Tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini memuat beberapa kegiatan yang terdiri dari aspek Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi umum, Penyediaan Jasa, Sarana dan Prasarana serta kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang nilai capaian serapan anggarannya sebesar 83,02 %.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini memuat beberapa kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mencapai sasaran yaitu Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai dengan serapan anggaran sebesar 86,44 %.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2022 Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79,02	100,02

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :



Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator dalam menilai kualitas pelayanan Dinas Perhubungan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung penilaian dari hasil pengukuran berupa kuisioner yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun terhadap pelayanan unit kerja Dinas Perhubungan terkait Pengujian kendaraan bermotor, Penerbitan Kartu Juru Parkir Khusus, Kartu Pengawasan dan Insidentil angkutan Umum. Nilai pelayanan publik berupa hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor, Kartu Pengawasan dan Insidentil serta Penerbitan Kartu Juru Parkir Khusus untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor = 79,25

SKM Pelayanan Kartu Pengawasan & Insidentil = 78,27

SKM Pelayanan Penerbitan Kartu Juru Parkir Khusus = 79,54

Sehingga SKM pelayanan publik Dinas Perhubungan Tahun 2022 = $79,25 + 78,27 + 79,54$ dibagi 3 = 79,02 poin

Target capaian kinerja pada Indikator 2.1: Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79 dengan realisasi sebesar 79,02 sehingga capaian kinerja adalah sebesar $79,02/79 \times 100\% = 100,02\%$. Dengan capaian sebesar 100,73% maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target dan mendapat interpretasi “sangat memuaskan”.

b. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	61,69	83,36



Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator dalam menilai kualitas pelayanan Dinas Perhubungan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung Penilaian rasio yang menunjukkan peningkatan nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan pada Tahun sebelumnya dengan tahun yang berikutnya. Nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan pada tahun 2021 = **61,69 poin** dengan kategori baik predikat **“B”** sehingga nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan menggambarkan nilai yang menurun dari tahun yang lalu karena ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. hal ini juga disebabkan karena minimnya anggaran yang diberikan dalam mencapai target kinerja, belum optimalnya perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yang akan dicapai atau ditetapkan. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan harus semakin terus berusaha untuk berbenah dalam meningkat akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan.

1) Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai.

a. Persentase peningkatan Pengawasan Jalan

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan Pengawasan Jalan	66	66,67	101,01

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran strategis ini sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan, dimana tujuan dan sasaran dari indikator diatas adalah untuk mengukur sejauh mana ketaatan masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya dan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di ruas jalan maupun persimpangan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung jumlah ruas jalan atau persimpangan yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi jumlah ruas jalan/simpang yang menjadi target dikali 100 %. Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang telah menempatkan beberapa personil dipersimpangan yang rawan dengan kemacetan untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan dan orang di persimpangan dan ruas jalan sehingga pada jam - jam sibuk pagi dan sore hari kelancaran dan ketertiban lalu lintas dapat dikendalikan dengan baik.

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang telah menargetkan sebanyak 20 ruas jalan dan persimpangan yang akan diatur dan dikendalikan dengan menempatkan personil dalam pengaturan, pengendalian dan mengurai kemacetan terutama pada jam – jam sibuk pagi dan sore hari khususnya pada ruas jalan dan persimpangan dilingkungan sekolah dan perkantoran dan objek keramaian lainnya dari jumlah ruas jalan atau persimpangan yang menjadi target sebanyak 30 Persimpangan. Dari 20 ruas jalan dan persimpangan tersebut selama tahun 2022 Dinas Perhubungan telah berhasil mengendalikan dan mengatur sebanyak 20 persimpangan yang dijaga dengan personil Dishub dan dari 20 ruas jalan dan persimpangan tersebut, 2 (dua) ruas jalan dan



persimpangan telah dilengkapi dengan APILL berupa Traffic Light dan 2 ruas jalan dilengkapi dengan Warning Light.

Sehingga jumlah persimpangan yang sudah dijaga dibandingkan dengan jumlah persimpangan yang perlu dijaga sampai dengan Tahun 2022 yang telah berhasil dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas terutama di ruas jalan dan persimpangan adalah :

Jumlah ruas jalan dan simpang yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas : Jumlah ruas jalan dan persimpangan yang menjadi target dikali 100% maka didapatkan perhitungan yaitu
 $= 20 : 30 \times 100 \% = \mathbf{66,67 \%}$

Target capaian kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan sebesar 66 dengan realisasi 66,67 sehingga capaian kinerja adalah sebesar $66,67/66 \times 100 \% = \mathbf{101,01\%}$. Dengan capaian sebesar 101,01%, maka indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan telah mencapai target sehingga mendapat interpretasi “ sangat baik”.

Pencapaian target ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan komitmen Dinas Perhubungan dengan melakukan kerja sama dengan stake holder terkait dalam mengurangi kemacetan lalu lintas khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Berikut nama ruas jalan/simpang rawan kemacetan sesuai tabel di bawah ini :

3.13

Daftar ruas jalan/persimpangan rawan kemacetan

No	Nama ruas jalan/persimpangan yang menjadi target	Nama ruas jalan/persimpangan yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1	Simpang Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam



2	Simpang Cemara Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Cemara Kecamatan Lubuk Pakam
3	Simpang Pantai Labu Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Pantai Labu Kecamatan Lubuk Pakam
4	Simpang Fachruddin Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Fachruddin Kecamatan Lubuk Pakam
5	Simpang Thamrin Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Thamrin Kecamatan Lubuk Pakam
6	Simpang Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam
7	Simpang Koramil Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Koramil Kecamatan Lubuk Pakam
8	Simpang SPBU/Jalan Antara Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam
9	Simpang KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Tol Binjai
10	Simpang Tangsi/Polresta Deli Serdang	Simpang Cokro Aminoto Kecamatan Lubuk Pakam
11	Simpang Cik Ditiro Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Megawati perbatasan Deli Serdang-Binjai
12	Simpang Cokro Aminoto Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Jodoh Kecamatan Percut Seituan
13	Simpang Cipto Kecamatan Lubuk Pakam	Simpang Bandar Khalippa Kecamatan Percut Seituan
14	Simpang Jodoh Kecamatan Percut Seituan	Simpang Kantor Pos Tanjung Morawa
15	Simpang Bandar Khalippa Kecamatan Percut Seituan	Terminal Simalingkar
16	Simpang Kantor Pos Tanjung Morawa	Terminal Mandala
17	Simpang Cemara Tanjung Morawa	Terminal Lubuk Pakam
18	Simpang Kayu Besar Kecamatan Tanjung Morawa	Terminal Williém Iskandar
19	Simpang Abu Nawas Kecamatan Tanjung Morawa	Terminal Deli Tua
20	Simpang Sinalko Kecamatan Tanjung Morawa	Terminal Pancur Batu
21	Simpang Permina Kecamatan Tanjung Morawa	-
22	Simpang Megawati perbatasan Deli Serdang-Binjai	-



23	Simpang Tol Binjai perbatasan Deli Serdang	-
24	Simpang Pama Deli Tua	-
25	Terminal Lubuk Pakam	-
26	Terminal Mandala	-
27	Terminal Williém Iskandar	-
28	Terminal Simalingkar	-
29	Terminal Deli Tua	-
30	Terminal Pancur Batu	-

Sumber : Bidang Lalu Lintas

b. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	56	56,50	100,89

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator utama Dinas Perhubungan dan menunjukkan pentingnya Dinas Perhubungan dibentuk yakni untuk meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan yang memadai sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung fasilitas perlengkapan di jalan dan prasarana perhubungan yang memadai dengan formulasi = $\frac{(\text{jumlah fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik} : \text{jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada}) \times (100\%) + (\text{jumlah halte bus dan terminal dalam kondisi baik} : \text{jumlah halte bus dan terminal yang ada}) \times (100\%)}{2}$.

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan menargetkan untuk fasilitas perlengkapan jalan berupa warning dan traffic light yang dipelihara/dirawat agar tetap berfungsi dengan baik ada sebanyak 10 unit yang kondisinya mengalami gangguan atau rusak dari 12 unit yang fasilitas perlengkapan jalan yang ada. Dari 10 unit traffic dan warning light yang menjadi target untuk diperbaiki atau dirawat tersebut, dinas perhubungan berhasil merawat 8 unit traffic light dan warning light, sehingga untuk fasilitas perlengkapan jalan yang memadai didapat capaian =

$$\frac{\text{Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Fasilitas perlengkapan jalan yang ada}} \times 100\% \\ = 8/12 \times 100 \% = \mathbf{67 \%}$$

Sedangkan untuk prasarana perhubungan berupa Terminal dan Halte bus yang memadai Dinas Perhubungan pada tahun 2022 menargetkan 18 unit prasarana dan simpul transportasi yang akan dirawat terdiri dari 6 Terminal dan 12 halte bus yang dipelihara/dirawat agar berfungsi dengan baik dari total 30 unit terminal dan halte bus yang layak saat ini. Dari 18 unit prasarana perhubungan tersebut, 6 terminal yang direncanakan akan dirawat sudah terawat dengan baik, ke enam (6) terminal tersebut dapat terawat tidak berdasarkan dana APBD Kabupaten Deli Serdang melainkan hasil kerjasama Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga (CV. Frans Dekorindo) dan para pengusaha angkutan di terminal. Sedangkan untuk halte bus, dari 24 unit halte bus yang ada 8 unit dalam kondisi baik 16 unit dalam kondisi kurang baik. Sehingga untuk prasarana perhubungan yang memadai capaiannya sama dengan:

$$\frac{\text{Prasarana perhubungan dalam kondisi baik}}{\text{Prasarana perhubungan yang ada}} \times 100\% \\ = 14/30 \times 100 \% = \mathbf{47 \%}$$

Sehingga pencapaian peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan memadai di peroleh = (67 % + 47 %)/2 = **56,50 %**



Target capaian kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai sebesar 56% dengan realisasi 56,60% sehingga capaian kinerja adalah sebesar $56,50\%/56\% \times 100\% = \mathbf{100,89\%}$.

Dengan capaian sebesar 100,89%, maka indikator Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan memadai sudah mencapai target sehingga mendapat interpretasi “sangat baik”. Pencapaian target ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan hal ini dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga fasilitas dan prasarana perhubungan dapat terawat dengan baik dan dapat melayani masyarakat pengguna transportasi umum di Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan memiliki 2 sasaran strategis yang masing-masing sasaran mempunyai 2 indikator sasaran dimana 3 indikator sasaran sudah tercapai dengan kategori sangat baik sedangkan 1 indikator sasaran tercapai dengan kategori baik.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan antara lain yaitu :
 - a. Dampak terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Dinas Perhubungan untuk merefocussing dan melakukan penyesuaian antara pengeluaran dengan pendapatan sehingga berdampak terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan.



- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja.

- a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja ke website OPD tepat waktu.
- b) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan seluruh kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- c) Meningkatkan kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- d) Meningkatkan kualitas penetapan target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.
- e) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- f) Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- g) Menetapkan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- h) Melaksanakan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- i) Merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai.



- j) Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja kepada setiap pegawai agar paham dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

- a) Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja.
- b) Mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja.
- c) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala.
- d) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada level organisasi.
- e) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- f) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penetapan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- g) Menjadikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- h) Menjadikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- i) Menjadikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- j) Menjadikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- k) Menjadikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- l) Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- m) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada setiap unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja.



- n) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a) Mempublikasikan dokumen laporan kinerja ke dalam website OPD.
- b) Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai dengan standar.
- c) Memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional(Benchmark Kinerja) pada dokumen laporan kinerja.
- d) Memuat informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada dokumen laporan kinerja.
- e) Memuat informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada dokumen laporan kinerja.
- f) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja.
- g) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- h) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- i) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



- c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d) Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan kepada pihak - pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASHARI TAMBUNAN

Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam,

2022

Pihak Kedua,


ASHARI TAMBUNAN

Pihak Pertama,


SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi yang aman dan memadai	1.	Persentase peningkatan pengawasan jalan	66 %
		2.	Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana Perhubungan yang memadai	56 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin
		2.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	4.896.870.450,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.999.804.924,-	APBD

Lubuk Pakam,

2022



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SURYADI ARTONANG, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199010 1 002**



Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2024)	
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
								target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran
1	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan		Persentase Pelayanan Perhubungan				50 %	50		56		61		67		71		71	
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan				60 %	60		63		66		68		70		70	
				2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	60 %	60		63		66		68		70		70	
				2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengawasan Pelaksanaan izin dan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	-	-	-	-	-	-	100	6.825.000,-	100	507.166.250	100	513.991.250,-
				2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	20	-	-	-	-	-	-	20	6.825.000,-	20	7.166.250,-	20	13.991.250,-



					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota														
				2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	
				2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100	100	455.506.300,-	100	309.762.688,-	100	299.887.144,-	100	314.881.501,-	100	830.625.576,-	100	2.210.663.209,-	
				2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	
				2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000	12.000	295.196.300,-	12.000	222.852.688,-	-	-	-	-	-	-	-	518.048.988,-	
				2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12.000	-	-	-	-	12.000	204.007.144,-	12.000	214.207.501,-	12.000	224.917.876,-	12.000	643.132.521,-	



				2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	8	160.310.000,-	8	86.910.000,-	8	95.880.000,-	8	100.674.000,-	8	105.707.700,-	8	549.481.700,-
				2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	100	100	3.028.250.000	100	3.250.870.000	100	2.485.848.240	100	2.615.140.652	100	2.745.897.685	100	14.126.006.577
				2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	12	1.366.729.648	-	-	-	-	12	1.366.729.648
				2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18	18	3.028.250.000	19	3.250.870.000	20	1.119.118.592	21	2.610.140.652	22	2.740.647.685	22	12.749.026.929
				2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	8	5.000.000	8	5.250.000	8	10.250.000
				2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin di Jalan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	100	31.000.000	100	32.550.000	100	63.550.000
				2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20.000.000	10	20.000.000



				2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	-	12	30.000.000	12	30.000.000	
				2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	-	-	-	-	-	14	31.000.000	20	32.550.000	20	63.550.000	
				2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum	100	100	2.090.484.800	100	2.373.642.694	100	1.387.255.066	100	2.353.183.756	100	2.530.842.944	100	10.735.409.260
				2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	300	241.500.000	275	281.400.000	250	105.840.000	225	150.000.000	200	157.500.000	200	936.240.000
				2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	120	120	1.833.384.800	120	2.075.862.694	120	1.259.008.416	120	2.179.655.829	120	2.288.638.620	120	9.636.550.359
				2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	15	15	15.600.000	15	16.380.000	-	-	-	-	-	-	30	31.980.000
				2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	15	22.406.650	20	23.527.928	20	24.704.324	55	70.638.901
				2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Barang	-	-	-	-	-	-	100	20.000.000	100	21.000.000	100	41.000.000	



					dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dan Angkutan Orang													
				2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	60	20.000.000	64	21.000.000	64	41.000.000	
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai				39 %	39 %		48 %		56 %		65 %		72 %		72 %	
				2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai	39 %	39 %	1.377.907.460	48 %	1.322.668.612	56 %	903.418.243	65 %	1.160.339.155	72 %	1.314.356.112	72 %	6.078.689.582
				2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	100	100	1.079.316.460	100	1.226.356.000	100	802.290.000	100	904.154.500	100	1.002.862.225	100	5.014.979.185
				2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	14	-	-	2	130.000.000	1	65.000.000	2	130.000.000	3	190.000.000	8	515.000.000
				2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia													
					Rambu Lalu Lintas		200	50	569.374.460	60	436.356.000	70	435.790.000	100	457.579.500	100	480.458.475	380	2.379.558.435



						Marka Jalan	5000	300		300		300		300		300		1500	
						Speed Bump	100	100		100		25		100		100		425	
						ZOSS	2	1		1		1		1		1		5	
				2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10	10	87.742.000	8	160.000.000	7	120.000.000	10	126.000.000	10	132.300.000	45	626.042.000
				2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara													
						APILL (Traffic Light & Warning Light)	20	14	422.200.000	14	500.000.000	14	181.500.000	14	190.575.000	14	200.103.750	70	1.494.378.750
						Rambu Lalu Lintas	25	25		25		20		25		25		120	
						Marka Jalan	5000	400		400		400		400		400		2000	
				2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pembangunan dan pemeliharaan Terminal dalam kondisi baik	100	100	298.591.000	100	96.312.612	100	101.128.243	100	256.184.655	100	311.493.887	100	1.063.710.397
				2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000
				2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000
				2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	6	3	298.591.000	2	96.312.612	3	101.128.243	3	106.184.655	3	111.493.887	6	713.710.397



2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				77 Nilai	77 Nilai		78 Nilai		79 Nilai		80 Nilai		81 Nilai		81 Nilai	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				77 Nilai	77 Nilai		78 Nilai		79 Nilai		80 Nilai		81 Nilai		81 Nilai	
				2.15.01	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Nilai	77 Nilai	2.165.760.500	78 Nilai	2.309.519.246	79 Nilai	2.025.252.525	80 Nilai	2.991.146.099	81 Nilai	3.015.772.803	81 Nilai	12.507.451.173
				2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	100	295.320.000	100	297.752.800	100	289.483.240	100	304.450.440	100	319.672.962	100	1.506.679.442
				2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80	80	179.520.000	80	189.784.000	88	188.496.000	88	199.273.200	88	209.236.860	88	966.310.060
				2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	168	168	87.600.000	168	91.600.000	156	83.800.000	156	87.990.000	156	92.389.500	156	443.379.500
				2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	28.200.000	20	16.368.800	20	17.187.240	20	17.187.240	20	18.046.602	20	96.989.882
				2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan	100	100	-	100	55.512.000	100	55.512.000	100	799.335.900	100	733.302.695	100	1.643.662.595
				2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	1	420.000.000	1	300.000.000	2	720.000.000



					Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang disediakan													
				2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	350.000.000	2	650.000.000	
				2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	10	18.133.920	10	19.040.616	20	37.174.536	
				2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	-	-	4	55.512.000	4	55.512.000	4	61.201.980	4	64.262.079	16	236.488.059
				2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan	100	100	465.699.600	100	522.722.302	100	492.957.598	100	517.605.478	100	543.485.752	100	2.542.520.730
				2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	12.000.000	2	22.204.800	2	22.204.800	2	23.315.040	2	24.480.792	2	104.205.432
				2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	52.217.400	3	31.876.100	3	31.876.100	4	33.469.905	4	35.143.400	18	184.582.905
				2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	401.482.200	12	468.691.402	12	438.876.698	12	460.820.533	12	483.861.560	12	2.253.732.392
						12	12	12		12		12		12					
				2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam menunjang Pelayanan Perhubungan	100	100	574.208.000	100	601.784.000	100	558.612.000	100	576.158.000	100	586.035.300	100	2.896.797.300
				2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1	-	-	-	-	1	40.476.000	1	40.476.000	1	40.476.000	1	121.428.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
				2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	369.462.000	10	369.462.000	9	328.986.000	10	328.986.000	10	328.986.000	10	1.725.882.000
				2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	197.456.000	2	223.172.000	1	180.000.000	1	197.546.000	1	207.423.300	1	1.005.687.300
				2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	15	15	7.200.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	43.800.000
				2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	100	830.522.900	100	831.698.144	100	628.687.687	100	793.596.281	100	833.276.095	100	3.917.791.106
				2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	17.248.800	3	5.181.120	3	3.392.400	1	3.562.020	1	3.740.121	11	33.124.461
				2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100.816.000	12	79.568.000	4	83.546.400	1	87.723.720	1	92.109.906	22	443.764.025
				2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	93.904.100	12	85.056.892	17	27.774.942	17	89.309.737	17	93.775.223	17	389.820.894



				2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	73.724.000	7	241.240.100	8	253.302.105	8	241.240.100	8	253.302.105	8	1.062.808.410
				2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	2	19.080.000	2	19.885.632	2	14.309.760	2	15.025.248	2	15.776.510	2	84.077.150
				2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	51.480.000	2	6.414.720	2	6.500.000	2	6.735.456	2	7.072.229	2	78.202.405
				2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	474.280.000	24	394.351.680	24	239.862.080	24	350.000.000	24	367.500.000	24	1.825.993.760
		Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah				70 Poin	70 Poin		72 Poin		74 Poin		76 Poin		78 Poin		78 Poin	
				2.15.01	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	8.712.030.747	72 Poin	8.552.858.781	74 Poin	8.688.278.424	76 Poin	8.757.318.488	78 Poin	8.929.754.152	78 Poin	43.640.240.592
				2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran	100	100	64.480.000	100	93.296.064	100	52.848.000	100	68.187.570	100	68.187.570	100	346.999.204
				2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18	18	64.480.000	18	93.296.064	8	52.848.000	8	68.187.570	8	68.187.570	8	346.999.204



						SKPD													
				2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	8.647.550.747	100	8.459.562.717	100	8.635.430.424	100	8.689.130.918	100	8.861.566.582	100	43.293.241.388
				2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	70	8.465.772.947	70	8.318.123.221	70	8.519.750.424	70	8.567.666.918	70	8.734.029.382	70	42.605.342.892
				2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	10	181.777.800	10	141.439.496	10	115.680.000	10	121.464.000	10	127.537.200	10	687.898.496



Lampiran 3. LHE SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2021

	PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514 Telepon (061) - 7951646 Faks (061) - 7951646 E-mail : inspektordeliserdang@gmail.com	
	Lubuk Pakam, 31 Agustus 2022	

Nomor	700 / LHE. 48. 19 / INSP / 2022	Kepada
Sifat	Penting	
Lampiran	(1) Satu Berkas	Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
Perihal	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	D. Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 094/DD/146/2022 tanggal 24 Juni 2022.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP.

LHE SAKIP DISHUB Kab. Deli Serdang Tahun 2021 1

di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan pada evaluasi ini adalah

- 1) Pengumpulan Dokumen
- 2) Analisa dan Penilaian
- 3) Pengamatan dan Wawancara

f. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.



- 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
- 4) Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi:
 - a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
 - b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek & Angkutan Barang
 - c) Seksi Pengujian Sarana
- 5) Bidang Prasarana, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Prasarana
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana
 - c) Seksi Pengoperasian Prasarana
- 6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - a) Seksi Pemaduan Moda & Teknologi Perhubungan
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c) Seksi Keselamatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya manusia pada bulan Desember tahun 2021 sebanyak 153 orang pegawai yang terdiri dari 65 orang PNS dan 88 orang Non PNS. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dengan status sebagai berikut

No	Rekomendasi	Status
1.	Membuat SOP monitoring rencana aksi	Ditindaklanjuti



No	Rekomendasi	Status
2	Menyusun laporan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala dan membuar laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan	Ditindaklanjuti
3	Menyusun Indikator Kinerja Individu	Ditindaklanjuti
4	Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya pada laporan kinerja	Ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 25,03 dari nilai maksimal 30,00.

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 6,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat Pedoman teknis perencanaan kinerja
- (2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang
- (3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, yang dilengkapi dengan Renstra
- (4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang dilengkapi dengan Renja
- (5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang dilengkapi dengan Rencana Aksi, Cascading dan Crosscutting
- (6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yang tertuang dalam DPA

- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai 5,44 dari nilai maksimal 9,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan
- (2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti) dalam 1 periode Perencanaan Strategis)



- (4) Unit/ satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Akan tetapi masih terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.
- (2) Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- (3) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- (4) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- (5) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- (6) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- (7) Setiap pegawai belum sepenuhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 13,59 dari nilai maksimal 15,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- (2) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- (3) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- (4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- (5) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- (2) Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- (3) Seluruh Pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.



2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 14,04 dari nilai maksimal 30,00

Penilaian pengukuran kinerja meliputi 3 sub komponen pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja menunjukkan bahwa

a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 6,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- (2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- (3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 5,79 dari nilai maksimal 9,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- (2) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- (3) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- (2) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- (3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- (4) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 2,25 dari nilai maksimal 16,00

Terdapat kriteria pemenuhan dokumen yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- (2) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.



- (3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- (4) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- (5) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- (6) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- (7) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- (8) Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- (9) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- (10) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 8,78 dari nilai maksimal 15,00.

Penilaian pelaporan kinerja meliputi 3 sub komponen pelaporan kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja menunjukkan bahwa:

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 2,50 dari nilai maksimal 3,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- (3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.
- (5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya memperoleh nilai 2,80 dari nilai maksimal 4,50

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.



- (3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Namun masih terdapat kriteria pemenuhan dokumen yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- (3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 3,48 dari nilai maksimal 7,50.

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- (2) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- (3) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Namun masih terdapat kriteria pemenuhan yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- (2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- (3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- (4) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 13,63 dan nilai maksimal 25,00



Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal meliputi 3 sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan bahwa:

- a) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 4,58 dari nilai maksimal 5,00**

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- (2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang.

- b) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 3,00 dengan nilai maksimal 7,50**

Terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar.
- (2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- (3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- (5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

- c) **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 6,25 dari nilai maksimal 12,50**

Terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- (1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya diindaklanjuti.
- (2) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- (3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



(4) Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

(5) Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan.

Terhadap kriteria dokumen yang belum sepenuhnya dilengkapi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

- a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja ke website OPD tepat waktu
- b) Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan seluruh Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- c) Meningkatkan kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- d) Meningkatkan kualitas penetapan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- e) Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- f) Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- g) Menetapkan anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- h) Melaksanakan aktivitas yang mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- i) Merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja kepada seluruh pegawai
- j) Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja kepada setiap Pegawai agar paham dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Mengumpulkan Data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja.
- b) Mengumpulkan Data kinerja yang mendukung capaian kinerja.
- c) Melakukan Pengukuran kinerja secara berkala.
- d) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada level organisasi.
- e) Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- f) Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- g) Menjadikan Pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
- h) Menjadikan Pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja



- i) Menjadikan Pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Ketetapan dalam mencapai kinerja.
- j) Menjadikan Pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- k) Menjadikan Pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- l) Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- m) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada Setiap unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja.
- n) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada Setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja ke dalam website OPD.
- b) Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai dengan standar.
- c) Memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Dokumen Laporan Kinerja.
- d) Memuat informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja.
- e) Memuat informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada Dokumen Laporan Kinerja.
- f) Melakukan sosialisasi pemahaman dan kepedulian kepada seluruh pegawai terhadap Penyajian informasi dalam laporan kinerja.
- g) Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- h) Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- i) Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- c) Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d) Memanfaatkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.



3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan tahun 2021 masuk dalam kategori **baik** dengan **predikat B (61,69)**. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang



Lampiran 4. Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2020

- 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
- 4) Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi:
 - a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
 - b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek & Angkutan Barang
 - c) Seksi Pengujian Sarana
- 5) Bidang Prasarana, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Prasarana
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana
 - c) Seksi Pengoperasian Prasarana
- 6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - a) Seksi Pemaduan Moda & Teknologi Perhubungan
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c) Seksi Keselamatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya manusia pada bulan Desember tahun 2021 sebanyak 153 orang pegawai yang terdiri dari 65 orang PNS dan 88 orang Non PNS. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/ Pengawas.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dengan status sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Status
1.	Membuat SOP monitoring rencana aksi	Ditindaklanjuti



No	Rekomendasi	Status
2	Menyusun laporan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala dan membuat laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan	Ditindaklanjuti
3	Menyusun Indikator Kinerja Individu	Ditindaklanjuti
4	Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya pada laporan kinerja	Ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 25,03 dari nilai maksimal 30,00.

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 6,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat Pedoman teknis perencanaan kinerja
- (2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang
- (3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, yang dilengkapi dengan Renstra
- (4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang dilengkapi dengan Renja
- (5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang dilengkapi dengan Rencana Aksi, Cascading dan Crosscutting
- (6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yang tertuang dalam DPA

- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai 5,44 dari nilai maksimal 9,00

Adapun kriteria pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- (1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan
- (2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)

